



**PUTUSAN**

**Nomor 3571 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARHENDI alias HEN bin SUWANDI;**  
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 30 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada Gang Andat, Desa Kalinilam,  
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten  
Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3571 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marhendi alias Hen bin Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marhendi alias Hen bin Suwandi dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Mito warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 25 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marhendi alias Hen bin Suwandi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3571 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Mito warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 9 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 25 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2021/PN Ktp *juncto* Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp *juncto* Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3571 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 1 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 1 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta, sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihubungi (ditelepon) oleh Tomi Kusuma Priyadi alias Tomi dan meminta tolong agar Terdakwa menjemput saksi Tomi Kusuma Priyadi alias Tomi di Melano sekitar jam 16.00 WIB, kemudian dari Ketapang Terdakwa langsung pergi ke Melano dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa;



- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Melano dan bertemu dengan saksi Tomi Kusuma Priyadi alias Tomi, Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Ketapang dengan memboncengkan saksi Tomi Kusuma Priyadi alias Tomi;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di dekat Polres Kayong Utara, saksi Tomi Kusuma Priyadi alias Tomi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan terlalu pelan pakai sepeda motornya, karena aku ada membawa sabu di dalam tas", maka pada saat itu juga Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Tomi Kusuma Priyadi alias Tomi membawa sabu dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dengan cukup kencang;
- Bahwa sesampai di Jalan Ketapang - Siduk tepat pada Km. 58 Desa Kuala Satong, Terdakwa bersama saksi Tomi Kusuma Priyadi alias Tomi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 29,93 (dua puluh sembilan koma sembilan tiga) gram yang disimpan di dalam tas selempang yang dipakai saksi Tomi Kusuma Priyadi alias Tomi;
- Bahwa walaupun Terdakwa terbukti memiliki dan menguasai sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa baru mengetahui saksi Tomi Kusuma Priyadi membawa sabu pada saat di perjalanan dan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 29,93 (dua puluh sembilan koma sembilan tiga) gram tersebut adalah milik saksi Tomi Kusuma Priyadi yang diperoleh dari seseorang yang bernama Herman untuk diserahkan kepada Sdr. Fitri. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki demi rasa keadilan dan disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3571 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 9 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 25 Januari 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 9 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 25 Januari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3571 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk **umum pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd/**

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

**Ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3571 K/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)